

UPAYA PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR OKP

Arina Risqi* & Dhiauddin Tanjung**

**) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. E-mail :
arinarisqisrg@gmail.com,*

****) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. E-mail :
dhiauddintanjung@uinsu.ac.id*

Abstract

The purpose of this study is to find out how the public views the existence of Youth Community Organizations in the city of Medan and what is the role of the Medan City government in efforts to resolve conflicts between Youth Community Organizations in Medan City. The research method used was field research using qualitative methods, with a case study approach and data collection techniques using participant observation and direct interviews with the people of Medan City. Efforts to resolve the conflict that has been carried out so far is mediation accompanied by the police. From the Medan City Government, because conflicts often occur in Medan Belawan, forming a Conflict Resolution Team to resolve conflict issues. The community thinks that the city government's settlement efforts are not quite right, it's not surprising that the community prefers to disband youth organizations that cause a lot of trouble. However, a few of the people felt there was benefit from the existence of the Youth Community Organization in Medan City

Keyword : Youth Community Organization, Conflict, Government

1. PENDAHULUAN

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang kesadarannya dilandasi oleh kesamaan kebutuhan, kepentingan, dan tujuan untuk ikut membangun tujuan bangsa. Adanya organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat memberikan peran kepada masyarakat dalam mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi Kemasyarakatan merupakan lembaga non-pemerintah yang keberadaannya diperlukan di negara demokrasi. Di Indonesia, pada masa pemerintahan Orde Baru Organisasi Kemasyarakatan hadir untuk mengontrol dinamika Organisasi Kemasyarakatan dengan penerapan konsep wadah tunggal yang dibina langsung oleh pemerintah, dan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Di Kota Medan terdapat beberapa Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang cukup besar, eksis dan terorganisir serta memiliki kekuatan di ruang publik, seperti Pemuda Pancasila (PP), Ikatan Pemuda Karya (IPK), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI).¹

Kemunculan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) saat ini seringkali menimbulkan ketakutan sebagian besar masyarakat karena perilaku pada level paling bawah langsung mengintervensi kehidupan masyarakat. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) sering

¹ Budi Saputra, Hidayat, and Ichwan Azhari, "Pola Okupasi Ruang Publik Oleh Organisasi Kepemudaan Di Kota Medan Sumatera Utara," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 12, no. 2 (2020): 470.

dianggap sebagai organisasi preman oleh masyarakat karena mereka sering melakukan aktivitas premanisme. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kota Medan sejatinya merupakan pendukung akar rumput partai politik sehingga mereka dapat menjalankan profesinya secara bebas tanpa harus berurusan dengan pemerintah atau pihak terkait. Mempertahankan suatu wilayah kekuasaan atau bahkan memperebutkan ruang publik yang dapat dilihat sebagai tempat mencari nafkah seringkali menimbulkan gesekan akibat perampasan tanah dan ego sektoral yang berujung pada pertikaian dan kerusuhan di Kota Medan.

Saat ini, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dianggap sebagai gangster atau tempat berkumpulnya preman, sehingga anggota Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) merasa bangga dan berani melakukan apa saja, merasa hebat dan berkuasa di daerah yang dikuasainya.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Dengan pendekatan studi kasus seperti konflik antar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kota Medan, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipan dan wawancara langsung dengan masyarakat Kota Medan, didukung dengan data lapangan yang diperoleh melalui informan, narasumber, dan analisis literatur serta dokumentasi dari beberapa artikel subjek yang diteliti.²

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keberadaan OKP di Kota Medan

Kota Medan adalah Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara, salah satu provinsi di Indonesia dan kota terbesar di Sumatera Utara. Secara geografis Kota Medan terletak antara: 2°.27'-2°.47' Lintang Utara, 98°.35'-98°.44' Bujur Timur dan berada pada 2,5-37,5 meter di sebelah Utara, Selatan, Barat, dan Timur dengan Kabupaten Deli Serdang. Secara administrasi Kota Medan terbagi menjadi 21 kecamatan dengan luas wilayah 265,10 km². Kota Medan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang dan sebagian besar wilayahnya merupakan daratan rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai, Babura dan Sungai Deli.³

² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, I. (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 43.

³ Arsip Nasional Republik Indonesia, *Citra Kota Medan* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2012), 5.

Kota Medan merupakan kota urban bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Pertambahan penduduk selain dari angka kelahiran juga diakibatkan oleh perpindahan penduduk dari berbagai daerah. Penyebaran penduduk yang tidak didukung oleh lingkungan dan pembangunan akan menimbulkan masalah sosial yang kompleks, di mana penduduk menjadi beban lingkungan dan sebaliknya. Kota Medan dengan luas wilayah mencapai 265,10 km², dan kepadatan penduduk mencapai 8.001 jiwa/km².⁴

Konflik berasal dari bahasa Latin "*Confligo*", yang berasal dari dua kata yaitu "*con*" yang berarti bersama-sama dan "*fligo*" yang berarti pemogokan, peremukan, atau penghancuran. Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepentingan atau perhatian pihak pertama.⁵

Konflik adalah pertarungan menang-kalah antara kelompok atau individu dengan kepentingan yang berbeda dalam suatu organisasi. Konflik juga merupakan jenis interaksi yang saling bertentangan atau antagonistik antara dua pihak atau lebih.⁶ Dengan kata lain, konflik merupakan gejala sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak mungkin dilenyapkan, sebagai gejala kemasyarakatan yang melekat di dalam kehidupan tiap masyarakat maka konflik akan lenyap bersama lenyapnya masyarakat itu sendiri. Konflik adalah pertentangan antara individu yang disebabkan oleh perbedaan dalam hal berpikir, tingkah laku, gagasan, persyaratan, kepentingan, juga dalam beberapa kasus yaitu prasangka, hal ini dapat menghasilkan pertengkaran yang menimbulkan hilangnya kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat.⁷

Konflik adalah proses pencapaian suatu tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan perilaku.⁸ Selain konflik, juga dikenal istilah kerusuhan (*riot*) yang berarti tindakan sekelompok orang yang beringas, kasar, agresif, dan merusak yang timbul dari suatu konflik dan pada hakekatnya adalah tindakan atau perilaku kekerasan kolektif dan deskriptif. Menurut Smelser, ada beberapa determinan yang mengarah pada kekerasan kolektif atau perilaku, yakni:⁹

1. Kesenjangan struktural: struktur masyarakat yang menyokong.
2. Ketegangan struktural: perasaan adanya ketidakadilan dalam masyarakat mendorong banyak orang melakukan perilaku ekstrim.

⁴ Ibid., 8.

⁵ Eko Sudarmanto et al., *Manajemen Konflik* (Makassar: Yayasan Kita Menulis, 2021), 2.

⁶ Ellya Rosana, "Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)," *Al-Adyan X*, no. 2 (2015): 216.

⁷ Elyta, "Penanganan Konflik Melalui Keamanan Di Kalimantan Barat," *Politik Profetik 9*, no. 2 (2021): 333.

⁸ Fajri M Kasim and Abidin Nurdin, "*Sosiologi Konflik Dan Rekonsiliasi (Sosiologi Masyarakat Aceh)*", (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2015), 17.

⁹ Ibid., 18.

3. Kemunculan dan penyebaran pandangan: pelaku-pelaku kekerasan sudah memiliki paham yang serupa mengenai sumber ancaman, jalan keluar serta cara pencapaian jalan keluar.
4. Faktor mempercepat: di mana adanya peristiwa dramatis atau desas-desus mempercepat munculnya perilaku kolektif.
5. Mobilitasi tindakan: para pemimpin memulai, menyarankan, dan mengarahkan suatu tindakan.
6. Robohnya kontrol sosial: semua faktor di atas jika tidak dapat dikendalikan oleh para pemimpin, kekuatan polisi, propaganda, perubahan kebijakan pemerintah, dan lembaga legislatif serta bentuk kontrol sosial lainnya, maka kerusuhan akan pecah.

Konflik tidak dapat terselesaikan jika tidak memahami penyebab konflik terlebih dahulu. Penanganan konflik adalah langkah-langkah perencanaan untuk menghindari konflik jika memungkinkan dan mengambil langkah yang tercepat. Untuk menangani konflik, memerlukan penyelidikan dan memverifikasi penyebab konflik dan memberikan tindakan korektif. Hal yang perlu diperhatikan bahwa konflik yang berbeda akan membutuhkan pendekatan yang berbeda pula dalam penyelesaiannya.¹⁰

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik adalah adanya hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlahnya terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat.¹¹ Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi atas dua, yaitu:

1. Kemajemukan horizontal, artinya adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultur misalnya suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi misalnya petani, buruh, pedagang, pegawai negeri dan lain sebagainya. Kemajemukan horizontal-kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan penghayatan ingin mempertahankan karakteristik tersebut.
2. Kemajemukan vertikal, artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara di sisi lain tidak atau kurang memiliki kekayaan dan pendidikan rendah serta tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian yang seperti ini merupakan benih-benih timbulnya konflik sosial.¹²

¹⁰ Diin Fitri, "Understanding and Managing Conflict," *Management and Leadership* 1, no. 1 (2018): 1–6.

¹¹ Elly M, Setiadi, and Usmani Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 361.

¹² Muhammad Awwad, "Model Bimbingan Konseling Berbasis Islami Dan Kearifan Lokal Di Kabupaten

Konflik juga bisa muncul karena masing-masing pihak atau salah satu pihak merasa dirugikan. Kerugian ini tidak hanya bersifat materi tetapi juga immateri. Jadi, hal pertama yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya konflik adalah mempelajari sebab-sebab berikut ini:¹³

- 1) Perbedaan pendapat/ketidaksepakatan
Konflik bisa muncul karena perbedaan pendapat, ketika masing-masing pihak merasa lebih baik atau paling benar. Jika perbedaan ini cukup terlihat, dapat menyebabkan rasa tidak enak, kerenggangan dan lain sebagainya.
- 2) Kesalahpahaman
Kesalahpahaman juga merupakan salah satu hal yang mudah menimbulkan konflik. Misalnya tindakan seseorang mungkin memiliki niat baik, tetapi bagi pihak lain tindakan tersebut dianggap merugikan.
- 3) Adanya rasa tidak nyaman atau dirugikan oleh salah satu atau kedua belah pihak
Tindakan seseorang mungkin dipandang merugikan orang lain, atau masing-masing mungkin merasa bahwa tindakan tersebut merugikan keduanya.
- 4) Perasaan yang berlebihan (terlalu sensitif)
Perasaan yang berlebihan (terlalu sensitif) adalah sesuatu hal yang normal tetapi menurut pihak lain hal ini dianggap merugikan. Jika dilihat dari perspektif hukum atau moralitas yang berlaku, sebenarnya tindakan ini tidak termasuk perbuatan yang salah, namun karena pihak lain terlalu sensitif, sehingga dianggap merugikan, maka dapat menimbulkan kerugian hingga konflik.

Hani Handoko menjelaskan dalam bukunya “Manajemen” bahwa dalam kehidupan berorganisasi, konflik dapat dibedakan menjadi lima menurut pihak-pihak yang berkonflik, yaitu:¹⁴

- 1) Konflik individu, yang timbul jika seorang individu menghadapi ketidakpastian perihal pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau ketika individu diharapkan untuk melakukan lebih dari yang mereka bisa.
- 2) Konflik individu dalam organisasi yang serupa, ini terjadi dikarenakan oleh perbedaan kepribadian, hal ini timbul karena konflik antar peranan.
- 3) Konflik individu dengan kelompok, yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang ditekankan oleh kelompok kerja mereka.
- 4) Konflik kelompok dalam organisasi yang sama, yang biasanya dikarenakan pertentangan kepentingan antar kelompok.
- 5) Konflik antar organisasi, yang muncul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan

Lombok Tengah” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 35–36.

¹³ Juliana Lumintang, “*Dinamika Konflik Dalam Organisasi*,” Acta Diurna IV, no. 2 (2015), 2.

¹⁴ Ibid., 3.

timbulnya pengembangan produk, teknologi, dan jasa layanan baru, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat dan dibentuk secara sukarela atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹⁵

Organisasi Kemasyarakatan merupakan faktor penting dalam terwujudnya demokrasi, di mana masyarakat dapat menggunakan hak kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan berkembang sebagai manusia yang bertanggung jawab, berbangsa dan bernegara dengan berpartisipasi dalam pembangunan negara. Sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia, Ormas mempunyai peran penting dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan menjamin tercapainya tujuan nasional.¹⁶

Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 59 ayat (3) huruf (c) bahwa: "*Ormas dilarang untuk melakukan tindak kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial*". Dari ketentuan Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap organisasi masyarakat dilarang untuk melakukan tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Organisasi adalah kegiatan yang mengatur hubungan antar sistem terbuka dan lingkungannya. Dalam hal ini organisasi manusia senantiasa mempunyai ciri terbuka, sebab organisasi sesungguhnya bukan sekedar wujud tetapi sistem. Berbicara mengenai sistem berarti juga melihat fungsi-fungsi yang ada dalam sistem tersebut. Tetapi, fungsi sebuah benda itu akan mudah dipahami bila kita berpikir dalam kategori sistemik.

Menurut Stephen Robbins organisasi merupakan unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, yang beranggotakan dua orang atau lebih bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur dan didirikan untuk mencapai satu tujuan tertentu.¹⁷

Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang saling terkait secara bebas. Suatu organisasi memiliki landasan yang terbentuk dengan baik dan berorientasi pada masa

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, 2013. Pasal 1 ayat (1).

¹⁶ C. S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 124.

¹⁷ Ahmad Sobiirin, *Budaya Organisasi* (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2007), 5–7.

depan. Landasan yang membentuk suatu organisasi lahir dari cita-cita sekelompok orang atau masyarakat. Untuk mencapai cita-cita tersebut maka sekelompok orang atau masyarakat membentuk berbagai perangkat normatif yang berbeda menganggap bahwa cita-cita yang ditetapkan dapat dicapai sebanyak mungkin.

Sama halnya dengan pemahaman Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang disingkat dengan OKP dalam penelitian ini lebih dilihat sebagai sebuah sistem yang hidup dan terbuka. Dilihat dari sejarah Indonesia OKP mempunyai sifat yang terbuka dalam jaringan yang hidup tersebut. Begitu pula di tengah dunia yang berkembang begitu cepat, Anthony Giddens mengatakan dunia yang berlari. Atau dalam kategori Thomas L. Friendman dunia yang datar sebab informasi yang berpindah begitu cepat seolah melampaui ruang waktu. Di tengah dunia seperti ini OKP perlu mencermati dirinya kembali dan menafsirkan ulang akan jati dirinya yang sesungguhnya di panggung kebangsaan.

OKP di Indonesia lahir dari cita-cita kemerdekaan. Kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan merupakan hak semua bangsa. Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa ini untuk mempertahankan kemanusiaan yang adil juga berdaulat. OKP yang lahir di Indonesia tentunya juga ingin mempertahankan nasionalisme yang memang sudah diinginkan sejak awal berdirinya sebuah organisasi.

Dalam konteks Indonesia, pemuda berperan besar dalam dinamika masyarakat Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dalam sejarah panjang pergerakan nasionalis dan dinamika pemuda pasca kemerdekaan. Sebagai pengakuan atas peran kaum muda, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dalam Undang-Undang ini pada Bab XI Pasal 40 dijelaskan bahwa:¹⁸

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda,
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan,
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 46 dijelaskan bahwa *“Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah”*.

3.2 Pandangan Masyarakat Terhadap Keberadaan OKP di Kota Medan

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, 2009, Pasal 40.

Di Kota Medan setidaknya terdapat 4 (empat) OKP yang dianggap memiliki kekuasaan luas di ruang publik yaitu Pemuda Pancasila (PP), Ikatan Pemuda Karya (IPK), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) yang bisa dikatakan cukup besar, eksis, dan terorganisir sebagai suatu organisasi.¹⁹

Tetapi beberapa tahun belakangan ini banyak sekali fenomena atau kejadian seperti betrokkan, konflik, pemalakan, dan kekerasan lainnya dengan pelaku utamanya adalah OKP yang terjadi di kalangan masyarakat Kota Medan, sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan masyarakat terhadap OKP tersebut terutama aktor yang sering muncul dalam konflik tersebut adalah OKP Pemuda Pancasila dan OKP Ikatan Pemuda Karya. Tidak jarang masyarakat meganggap mereka sebagai preman.

Pemuda Pancasila (PP) merupakan organisasi kepemudaan yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1959. Tujuan didirikannya organisasi ini tidak lain adalah untuk mempertahankan dan menjaga NKRI, mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, seperti namanya Pemuda Pancasila yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Ada beberapa poin yang menjadi perjuangan Pemuda Pancasila seperti: *Pertama*, menjaga, mengamankan dan mengamalkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan ideologi negara. *Kedua*, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. *Ketiga*, mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI dan menjunjung tinggi semangat *Bhineka Tunggal Ika*. *Keempat*, menciptakan kader Pemuda Pancasila sebagai kader bangsa yang konsisten menjaga kehormatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta pergaulan internasional. *Kelima*, mewujudkan pemberdayaan dan peningkatan anggota untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota dan juga keluarga Pemuda Pancasila.²⁰

Pemuda Pancasila merupakan salah satu OKP di Kota Medan yang anggotanya berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Pemuda Pancasila berlandaskan pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, karenanya melatih setiap kader Pemuda Pancasila yang berwawasan, selalu berpegang teguh pada nilai-nilai budaya bangsa sehingga mampu memahami dan tanggap terhadap persoalan dan permasalahan bangsa di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Ikatan Pemuda Karya atau yang disingkat dengan IPK adalah OKP yang berorientasi dan berjuang di bidang karya dan kekarya, berprinsip pada Pancasila dan UUD 1945 serta bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa sama hal yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Ikatan Pemuda Karya berorientasi pada karya dan kekarya, artinya setiap anggota Ikatan Pemuda Karya adalah para pemuda bangsa yang wajib bekerja dan berkarya dalam pengertian yang baik dan benar demi mengisi kehidupannya sekaligus merupakan partisipasinya dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

¹⁹ Budi Saputra, Hidayat, and Ichwan Azhari, "Pola Okupasi Ruang Publik Oleh Organisasi Kepemudaan Di Kota Medan Sumatera Utara," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 12, no. 2 (2020), 470.

²⁰ Hasil-Hasil Keputusan Musyawarah Besar IX Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila, 2014, Pasal 10.

Demi mencapai tujuannya, Ikatan Pemuda Karya memiliki tugas pokok di bidang ideologi, politik, sosial budaya, serta pada bidang pertahanan dan keamanan nasional.

Peran Ikatan Pemuda Karya dalam pembangunan di Kota Medan tidak terpisahkan dengan masyarakat setempat. Secara organisatoris, Ikatan Pemuda Karya dapat menghimpun masyarakat untuk secara sukarela berpartisipasi dan memberikan penyuluhan, pelatihan, pelayanan ketenagakerjaan kepada para pengangguran seperti bekerja sebagai tukang parkir dan menjaga ketertiban di daerah kekuasaan masing-masing. Dengan keikutsertaan Ikatan Pemuda Karya dalam kegiatan Kodim (Komando Distrik Militer) di Kota Medan untuk mengikuti bakti sosial dan pelatihan dasar kemiliteran akan membangun semangat anggota Ikatan Pemuda Karya, berarti otomatis keamanan dan kenyamanan Kota Medan terwujud secara mandiri.²¹ Demi kenyamanan dan ketertiban masyarakat Kota Medan, perlu penguatan pendidikan bagi anggota-anggota OKP dengan melalui kombinasi pendidikan sekolah dan pendidikan keluarga, media propaganda dan pemerintah, sehingga meminimalisir terjadinya konflik.²²

Dengan melihat tujuan keberadaan suatu organisasi, saat ini fenomena keberadaan OKP telah memicu kegelisahan bagi mayoritas masyarakat akibat tingkah laku di level bawah yang langsung bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Konflik OKP yang sering terjadi di Kota Medan yaitu antara Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya sebab dianggap memiliki kekuatan yang hampir setara. Konflik di Kota Medan bisa terjadi dikarenakan hal-hal berikut:

1. Memperebutkan Lahan

Berdirinya Ikatan Pemuda Karya pada tahun 1987 oleh Olo Panggabean memberikan kesan bahwa organisasi Pemuda Pancasila berlomba-lomba menguasai sumber kehidupan yang ada di jalanan, yaitu lahan yang dahulu dikuasai oleh anggota Pemuda Pancasila, namun akhirnya harus terbagi dua dengan anggota Ikatan Pemuda Karya. Konflik sering muncul di tempat-tempat yang menghasilkan banyak uang seperti lahan parkir, pajak atau tempat pedagang yang banyak berjualan, dan pusat-pusat perbelanjaan.

Seperti yang terjadi di kawasan Martubung, Medan Labuhan pada September 2022, konflik antara anggota Pemuda Pancasila dengan Ikatan Pemuda Karya dikarenakan perebutan lahan parkir. Konflik berakhir setelah polisi turun ke lokasi untuk membubarkan kelompok massa tersebut. Konflik yang terjadi membuat masyarakat ketakutan. Dalam hal ini, pihak berwajib yakni polisi langsung turun begitu mendengar ada konflik antara OKP itu. Melalui mediasi, konflik dapat diselesaikan dan kawasan yang menjadi alasan terjadinya konflik menjadi bebas

²¹ Susilawati, "Peran Organisasi Kepemudaan Sebagai Komponen Pendukung Dalam Sistem Pertahanan Semesta (Studi Pada: Ikatan Pemuda Karya, Di Kota Medan)," *Jurnal Prodi Peperangan Asimetris* 3, no. 3 (2017), 41–62.

²² Yongzhi Jiang, "Research On The Participation of Youth Social Organization in Social Governance," *Advances in Economics, Business and Management Research* 110 (n.d.).

parkir, jika masih terjadi pengutipan parkir, maka polisi akan turun tangan dan menindak sebab termasuk kutipan liar atau premanisme.²³

2. Menjaga Eksistensi Masing-masing OKP

Dalam rentetan konflik yang terjadi, terlihat bahwa setiap anggota OKP sangat teguh untuk mempertahankan eksistensi organisasinya. Setiap OKP berpikir bagaimana menjatuhkan pihak lawan dan harus memenangkan setiap perlawanan, sebab kemenangan itu akan dianggap sebagai kemenangan dari organisasi, dan kelompok yang menang akan lebih dihormati oleh pihak yang lain. Setiap anggota OKP akan saling mempertahankan diri dalam membesarkan nama organisasi masing-masing. Anggota dari kedua organisasi ini apabila terkena musibah seperti kena bacok, tikam, ataupun meninggal dunia, biasanya akan mendapatkan bantuan atau dana dari orang-orang yang berada di dalam organisasinya masing-masing. Kesetiaan para anggota OKP akan terlihat ketika mereka menghadapi masalah besar dengan nama organisasi, sehingga semangat solidaritas dan persatuan akan muncul.

Pada tahun 2019 tepatnya pada 8 September di Medan Johor, Jl. Eka Rasmi, Kota Medan, terjadi konflik antar kedua OKP yang dikarenakan penurunan spanduk oleh OKP Ikatan Pemuda Karya, yang membuat ratusan OKP Pemuda Pancasila mendatangi sebuah warung yang diisi oleh 8 orang OKP Ikatan Pemuda Karya. Dari peristiwa tersebut menimbulkan cekcok dan adu mulut yang mengakibatkan 2 orang luka-luka di bagian kepala. Pihak berwajib Satuan Sabahra Polresrabes Medan mengambil tindakan dengan mengamankan 8 orang dari OKP Pemuda Pancasila, dan 11 orang dari OKP Ikatan Pemuda Karya.²⁴

Dari bentrok tersebut terlihat bahwa masing-masing OKP mempertahankan eksistensinya dengan tidak ingin terlihat lemah di depan lawan. Hanya dikarenakan penurunan salah satu spanduk OKP dapat menimbulkan konflik yang berujung adanya korban.

3. Dendam/ Sakit hati

Konflik antara OKP Pemuda Pancasila dan OKP Ikatan Pemuda Karya biasanya timbul karena rasa sakit hati dari para anggotanya. Di tahun 2016 terjadi konflik antar kedua OKP Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya. Yang berawal beberapa rombongan Ikatan Pemuda Karya yang melintas di kantor MPW, terlihat saling ejek dengan anggota Pemuda Pancasila yang ada di lokasi yang berujung konflik. Rombongan Ikatan pemuda Karya yang beralih ke Jalan Asia, dan puluhan massa Pemuda Pancasila telah mengepungnya. Akibatnya, kantor MPW Pemuda Pancasila dirusak dengan kerusakan kaca kantor bahkan sepeda motor anggota Pemuda Pancasila dibakar yang terparkir di depan kantor MPW.

²³ Nizar Aldi and Datuh Haris Molana, "Rebutan Lahan Parkir, PP VS IPK Bentrok Di Medan Labuhan," DetikSumut, last modified 2022, accessed March 18, 2023, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6268369/rebutan-halan-parkir-pp-vs-ipk-bentrok-di-medan-labuhan>.

²⁴ Kaskus, "Bentrok Dua OKP Di Medan Johor, Ini Penyebabnya," Kaskus, last modified 2019, accessed April 6, 2023, <https://m.kaskus.co.id/thread/5d768c1bf4d6953b64101e20/bentrok-dua-okp-di-medan-johor-ini-penyebabnya>.

Konflik ini dikabarkan menewaskan sebanyak 3 (tiga) orang. Aparat gabungan TNI dan Polri menurunkan kekuatan penuh untuk mencegah bentrok berulang, namun masih terjadi konflik susulan di sejumlah ruas jalan seperti di Jalan Juanda, Jalan Brigjen Katamsa, Jalan Yos Sudarso Simpang Glugur dan Jalan Djamin Ginting Medan.²⁵

Dampak dari konflik yang terjadi antara organisasi Pemuda Pancasila dan organisasi Ikatan Pemuda Karya menyebabkan masyarakat tidak menyukai bahkan membenci keberadaan kedua organisasi tersebut. Seringkali jika terjadi kerusuhan atau konflik, masyarakatlah yang memberikan informasi kepada aparat keamanan agar mereka dapat segera mengambil tindakan yang dianggap dapat meredakan keributan tersebut. Masyarakat juga sudah sepakat satu sama lain, jika aparat keamanan tidak mengambil tindakan tegas, masyarakat akan menangani organisasi pemuda yang sering membuat onar dan kekacauan di sekitar tempat tinggal mereka atau daerah mereka berjualan. Keamanan menjadi terganggu dan masyarakat menjadi tidak aman di tengah-tengah kelompok pemuda yang sedang konflik. Kegiatan masyarakat menjadi terganggu bahkan terhenti. Hal ini terlihat dari keadaan jalanan yang sepi dan pasar yang banyak ditinggalkan para pedagang ketika timbul konflik sehingga mengakibatkan penurunan dan beberapa kerugian.²⁶

Konflik antara organisasi Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya sudah ada sejak tahun 1990 dan yang mengejutkan setelah lama berdamai, Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya konflik pada tahun 2016, yang menyebabkan dua orang anggota dari dua organisasi tersebut meninggal dunia.²⁷ Tak hanya itu setiap tahunnya selalu terjadi konflik antar OKP, seperti di tahun 2022 lagi-lagi kedua OKP tersohor di Kota Medan terlibat bentrok di kelurahan Belawan Sicanang, Kec. Medan Belawan. Motif yang tidak diketahui awal terjadinya bentrokan sampai mengakibatkan adanya luka bacok di pergelangan tangan salah satu polisi, dan satu korban luka tembak senapan angin. Atas kejadian tersebut, personel dari Polsek Belawan, Sat Sabraha Polres Pelabuhan Belawan, Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan dan Pawas/Padal turun ke TKP untuk monitor kejadian dan melakukan pengamanan yang dibantu oleh Sat Brimob Polda Sumut.²⁸

Akibat konflik tersebut, masyarakat sendiri juga menjadi sasaran jika terjadi kerusuhan dari masing-masing OKP yang membuat kekacauan. Penyelesaian konflik yang baik adalah dengan mempertemukan pimpinan dari dua kelompok yang sedang mengalami konflik

²⁵ Wikipedia, “*Penyebab Bentrok Ormas Di Medan IPK Dan PP Saling Ejek Akhirnya Perang*,” Wikipedia, last modified 2016, accessed April 5, 2023, <https://www.wikipedia.web.id/2016/01/penyebab-bentrok-ormas-di-medan-ipk-dan.html?m=1>.

²⁶ Budi Syahputra, Hidayat Hidayat, and Ichwan Azhari, “*Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Di Kota Medan Dan Upaya Penyelesaiannya*,” *Jurnal Antropologi Sumatera* 16, no. 2 (2021), 53.

²⁷ Ibid.

²⁸ CNN, “*Bentrok Pemuda Pancasila Dan IPK Di Medan, Polisi Kena Bacok*,” CNN Indonesia, last modified 2022, accessed April 6, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220810130204-12-832806/bentrok-pemuda-pancasila-danipk-di-medan-polisi-kena-bacok>.

dan masing-masing kelompok atau organisasi menyampaikan pendapatnya masing-masing secara terbuka dan tanpa ada yang ditutupi. Pertemuan semacam ini sering membuahkan hasil dan menjadi titik awal untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Hal seperti ini yang terjadi pada organisasi Pemuda Pancasila dengan organisasi Ikatan Pemuda Karya setelah adanya kesepakatan damai. Semua anggota organisasi harus mematuhi perintah pimpinan organisasi, walau begitu terkadang masih ada anggota yang melanggar kesepakatan damai padahal sudah disertai sanksi jika melanggar, apabila anggota dari kedua belah pihak mulai terlibat konflik dan membuat onar, maka sudah ada hukumannya yaitu masuk penjara.²⁹

Pada tahun 2018 Mei terjadi konflik antara organisasi dari Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya di Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli. Konflik terjadi dikarenakan perselisihan paham, kedua belah pihak berselisih adanya perkataan yang saling menyinggung di sekitar lokasi. Masing-masing OKP mencoba melakukan serangan dengan menggunakan broti dan benda tajam. Konflik tidak sempat memakan korban jiwa, suasana yang sempat terjadi keributan kembali aman. Perdamaian langsung dimediasi Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan SH MH dengan mengajak masing-masing OKP menyepakati perdamaian secara tertulis.³⁰

Dari penjelasan di atas muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan OKP di Kota Medan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti melakukan wawancara langsung kepada masyarakat Kota Medan. Dari hasil wawancara, pandangan masyarakat Kota Medan dominan menganggap keberadaan OKP merugikan sekitar. Sebagian masyarakat Kota Medan sangat merasa terganggu dengan sikap-sikap para OKP yang sering membuat onar. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Rini (34 tahun) salah satu masyarakat Kota Medan yang berprofesi sebagai guru:

“OKP yang sering buat keributan apalagi OKP yang masih berusia sangat muda bawaannya mau buat keributan aja, dan maunya OKP yang ada di Kota Medan ini mereka buat yang bermanfaat lah jangan taunya buat onar, mereka baik-baik saja selagi mereka tidak berbuat onar”. (Wawancara 26 Maret 2023).

Hal yang sama juga dirasakan oleh Puan Hasibuan (30 Tahun) bahwa keberadaan OKP itu sangat meresahkan, dan menurut Puan pemerintah harus menindak lanjuti konflik antar OKP melalui jalur hukum:

“Terkadang dari sikap masing-masing organisasi ada plus dan ada minusnya, karena kalau dilihat dari tingkat solidaritas pertemanan mereka sangat tinggi, namun mereka lupa bahwa mereka selalu membuat kerusuhan. Contohnya menjadi juru parkir, saya

²⁹ Syahputra, Hidayat, and Azhari, “Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Di Kota Medan Dan Upaya Penyelesaiannya,” 54.

³⁰ Metro, “Diduga Selisih Paham, Dua OKP Bentrok Di Medan Deli,” Metro Online.Co, last modified 2018, accessed March 18, 2023, <https://www.metro-online.co/2018/06/diduga-selisih-paham-dua-okp-bentrok-di.html>.

sangat kesal jika ada pemungutan parkir yang tidak ada penanggung jawabnya, mereka mau memungut uang parkir, namun jika ada kehilangan kendaraan mereka malah angkat tangan. Menurut saya menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan itu baik, namun jika dengan cara tersebut mereka tidak ada perubahan maka pemerintah harus menyikapi dengan memberikan hukuman atau dalam bentuk pidana". (Wawancara 26 Maret 2023).

Arsyata (30 tahun) seorang guru swasta bertanggung jawab bahwa keberadaan OKP sangat merugikan masyarakat dan berharap OKP yang sering berbuat onar sebaiknya dibubarkan:

"Terkait dengan OKP yang ada di Medan lebih ke hal negatif karena banyak hal yang mereka lakukan cenderung ke arah yang negatif dan merugikan masyarakat setempat dan lagi banyak yang bergabung di OKP tersebut orang yang sudah lansia dan banyak preman berdalih sebagai anggota organisasi, jika OKP tersebut sangat bermanfaat atau berpengaruh (baik) itu dipertahankan, jika OKP tersebut banyak merugikan lebih baik dibubarkan saja". (Wawancara 26 Maret 2023).

3.3 Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Menyelesaikan Konflik Antar OKP

Dalam hal ini Kesbangpol juga berperan menangani daerah rawan konflik di Kota Medan, bersama dengan FISIP USU sejak tahun 2019 dalam pemetaan dan evaluasi wilayah rawan konflik yang bertujuan untuk melaksanakan Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kota Medan yang menghasilkan data wilayah rawan konflik salah satunya konflik antar OKP seperti di Medan Baru, Medan Belawan, Helvetia, Medan Deli, Medan Johor, Medan Kota Medan Tuntungan, Medan Perjuangan, dan Medan Sunggal.

Sesuai dengan arahan anggota Komisi 1 DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution, untuk menindaklanjuti konflik tersebut, Kesbangpol melakukan Rapat Koordinasi bersama dengan DPR dan Inspektorat untuk memperkuat pengawasan dan pengauditan, yang bertujuan untuk menjaga kondusifitas masyarakat di Kota Medan dengan pengelolaan elemen-elemen yang ada di masyarakat. Elemen yang dimaksud adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya.

Guna meredakan dan mengatasi tawuran, bentrok, konflik yang sering terjadi di Kota Medan, pada tanggal 25 April 2022, Pemerintah Kota Medan membentuk Tim Penyelesaian Konflik. Yang diharapkan bisa menyelesaikan konflik yang terjadi selama ini sehingga dapat mewujudkan Medan Kondusif sesuai dengan Visi Misi Wali Kota Medan Bobby Nasution. Nantinya Tim yang terdiri dari Pemerintah Kota Medan dan unsur Forkopimcam (Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan) akan melakukan penjagaan di posko-posko yang akan didirikan di dekat lokasi yang terjadi konflik.³¹

³¹ Pemko Medan, "Pemko Medan Akan Bentuk Tim Penyelesaian Konflik Guna Atasi Tawuran Di Kecamatan Medan Belawan," Pemerintah Kota Medan, last modified 2022, accessed April 8, 2023,

Dari banyaknya konflik antar OKP Pemuda Pancasila dengan Ikatan Pemuda Karya, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menyelesaikan konflik yang terjadi adalah dengan turun langsung ke tempat kejadian perkara dengan dilanjutkan melakukan mediasi antara kedua OKP. Pihak kepolisian memfasilitasi mediasi untuk menyelesaikan dengan cara damai melalui memanggil masing-masing pihak yang berkonflik untuk bertemu dengan didampingi oleh pihak kepolisian. Keterlibatan pihak kepolisian dalam menyelesaikan konflik tidak melibatkan pihak pemerintah daerah, hal ini disebabkan konflik yang terjadi dirasa masih dalam skala kecil.

Dalam pengembangan keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat pemerintah bekerjasama dengan aparat keamanan serta melibatkan seluruh elemen masyarakat di Kota Medan. Dari hasil penelitian bahwa TNI dan Polri sigap menangani konflik di masyarakat. Maka, Polri telah memposisikan diri sebagai penegak hukum. Seperti dalam hal menyelesaikan konflik yang terjadi antar OKP dimana mendahulukan mencari solusi yang terbaik tanpa adanya kerugian baik bagi masing-masing OKP dan juga masyarakat yang terlibat.

Di sisi lain, terdapat TNI yang diharapkan dapat bersinergi dengan pihak kepolisian. Pada prinsipnya TNI bertanggung jawab dalam keutuhan Indonesia. Maka dari itu, dalam hal menyelesaikan konflik sejauh ini TNI terlibat langsung dalam pengamanan. Di Kota Medan sendiri, institusi TNI dituntut harus tetap dalam posisi netral dalam menyelesaikan konflik di masyarakat.

4. KESIMPULAN

Masyarakat yang sudah biasa dengan konflik antar OKP merasa sikap dari organisasi-organisasi tersebut sangat meresahkan, tak jarang masyarakat menganggap mereka sebagai preman. Terutama anggota organisasi yang memaksa masyarakat untuk membayar uang parkir di pasar atau tempat umum yang berpotensi ramai pengunjung. Dan masyarakat beranggapan bahwa upaya penyelesaian dari pemerintah kota kurang tepat. Dari hal tersebut masyarakat lebih memilih untuk membubarkan organisasi kepemudaan yang banyak membuat onar. Namun, sedikit dari masyarakat merasa adanya kemanfaatan dengan keberadaan OKP di Kota Medan. Penyelesaian konflik yang dilakukan selama ini adalah dengan mediasi didampingi oleh pihak kepolisian. Dari Pemerintah Kota Medan, dikarenakan sering terjadi konflik di Medan Belawan, membentuk Tim Penyelesaian Konflik guna mengatasi permasalahan konflik. Dalam hal ini Kesbangpol melakukan Rapat Koordinasi bersama dengan DPR dan Inspektorat untuk memperkuat pengawasan dan pengauditan, yang bertujuan untuk menjaga kondusifitas masyarakat di Kota Medan dengan pengelolaan elemen-elemen yang ada di masyarakat.

Referensi

<https://pemkomedan.go.id/artikel-22267-pemko-medan-akan-bentuk-tim-penyelesaian-konflik-guna-atasi-tawuran-di-kecamatan-medan-belawan.html>.

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. I. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Aldi, Nizar, and Datuh Haris Molana. "Rebutan Lahan Parkir, PP VS IPK Bentrok Di Medan Labuhan." *DetikSumut*. Last modified 2022. Accessed March 18, 2023. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6268369/rebutan-halan-parkir-pp-vs-ipk-bentrok-di-medan-labuhan>.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. *Citra Kota Medan*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2012.
- Awwad, Muhammad. "Model Bimbingan Konseling Berbasis Islami Dan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lombok Tengah." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- CNN. "Bentrok Pemuda Pancasila Dan IPK Di Medan, Polisi Kena Bacok." *CNN Indonesia*. Last modified 2022. Accessed April 6, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220810130204-12-832806/bentrok-pemuda-pancasila-danipk-di-medan-polisi-kena-bacok>.
- Elyta. "Penanganan Konflik Melalui Keamanan Di Kalimantan Barat." *Politik Profetik* 9, no. 2 (2021).
- Fitri, Diin. "Understanding and Managing Conflict." *Management and Leadership* 1, no. 1 (2018).
- Jiang, Yongzhi. "Research On The Participation of Youth Social Organization in Social Governance." *Advances in Economics, Business and Management Research* 110 (n.d.).
- Kansil, C. S. T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Kasim, Fajri M, and Abidin Nurdin. *Sosiologi Konflik Dan Rekonsiliasi (Sosiologi Masyarakat Aceh)*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2015.
- Kaskus. "Bentrok Dua OKP Di Medan Johor, Ini Penyebabnya." *Kaskus*. Last modified 2019. Accessed April 6, 2023. <https://m.kaskus.co.id/thread/5d768c1bf4d6953b64101e20/bentrok-dua-okp-di-medan-johor-ini-penyebabnya>.
- Lumintang, Juliana. "Dinamika Konflik Dalam Orgnisasi." *Acta Diurna* IV, no. 2 (2015): 12.
- M, Elly, Setiadi, and Usmani Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Metro. "Diduga Selisih Paham, Dua OKP Bentrok Di Medan Deli." *Metro Online.Co*. Last modified 2018. Accessed March 18, 2023. <https://www.metro-online.co/2018/06/diduga-selisih-paham-dua-okp-bentrok-di.html>.

Pemko Medan. "Pemko Medan Akan Bentuk Tim Penyelesaian Konflik Guna Atasi Tawuran Di Kecamatan Medan Belawan." *Pemerintah Kota Medan*. Last modified 2022. Accessed April 8, 2023. <https://pemkomedan.go.id/artikel-22267-pemko-medan-akan-bentuk-tim-penyelesaian-konflik-guna-atasi-tawuran-di-kecamatan-medan-belawan.html>.

Rosana, Ellya. "Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)." *Al-AdYan X*, no. 2 (2015): 216.

Saputra, Budi, Hidayat, and Ichwan Azhari. "Pola Okupasi Ruang Publik Oleh Organisasi Kepemudaan Di Kota Medan Sumatera Utara." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 12, no. 2 (2020): 469.

Sobiirin, Ahmad. *Budaya Organisasi*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2007.

Sudarmanto, Eko, Universitas Muhammadiyah Tangerang, David Tjahjana, Bonaraja Purba, Irdawati, D Diena Tjiptadi, Syahfirzal Iskandar Kato, Rosdiana, and Novita Verayanti Manalu. *Manajemen Konflik*. Makassar: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Susilawati. "Peran Organisasi Kepemudaan Sebagai Komponen Pendukung Dalam Sistem Pertahanan Semesta (Studi Pada: Ikatan Pemuda Karya, Di Kota Medan)." *Jurnal Prodi Peperangan Asimetris* 3, no. 3 (2017): 41–62.

Syahputra, Budi, Hidayat Hidayat, and Ichwan Azhari. "Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Di Kota Medan Dan Upaya Penyelesaiannya." *Jurnal Antropologi Sumatera* 16, no. 2 (2021).

Wikipedia. "Penyebab Bentrok Ormas Di Medan IPK Dan PP Saling Ejek Akhirnya Perang." *Wikipedia*. Last modified 2016. Accessed April 5, 2023. <https://www.wikipedia.web.id/2016/01/penyebab-bentrok-ormas-di-medan-ipk-dan.html?m=1>.

Hasil-Hasil Keputusan Musyawarah Besar IX Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, 2009.